
Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah

Ahmad Sahide

Program Doktor Kajian Timur Tengah, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281
Email: ahmadsahide@yahoo.com

Abstract

Kurdistan tribe is the name of the ethnic unity occupying some countries in Middle East region, mainly Iraq, Iran, and Turkey. The existence of the Kurdistan tribe, with different ethnic from the majority, is always viewed as the region problem and treated discriminatively. Thus, the Kurdistan community always makes movement, even always does rebellion, for the sake of fighting their political right. This writing explains the existence and the form of the political movements of the Kurdistan, in the three main countries above, in fighting their political right, either autonomy or independence demand, even though the dreams of the Kurdistan movement is difficult to be brought into reality.

Keywords: Kurdistan tribe, political movement, political right, Middle East.

Abstrak

Suku Kurdi adalah nama dari kesatuan etnis yang menempati beberapa negara di kawasan Timur Tengah, terutama Irak, Iran, dan Turki. Keberadaan suku Kurdi yang berbeda dengan etnik pada umumnya, selalu dipandang sebagai masalah wilayah dan diperlakukan diskriminatif. Dengan demikian, suku Kurdi selalu membuat gerakan, bahkan pemberontakan demi memperjuangkan hak politik. Tulisan ini menjelaskan keberadaan dan bentuk gerakan politik Kurdi di tiga negara utama diatas dalam memperjuangkan hak politik, baik otonomi atau permintaan kemerdekaan, meskipun mimpi dari gerakan Kurdi sulit untuk diwujudkan.

Kata kunci: Suku Kurdi, gerakan politik, hak politik, Timur Tengah

PENDAHULUAN

Secara geografis, wilayah Timur Tengah termasuk wilayah yang cukup strategis dan penting kehadirannya di dunia, baik secara politik maupun ekonomi. Timur Tengah juga merupakan wilayah yang menjadi pusat dari agama dunia yang berbasis agama samawi (agama langit/wahyu), agama tersebut adalah Islam, Yahudi, dan Nasrani (*Surwandono, 2009: 174*). Namun dengan semua itu, sampai saat ini wilayah ini dikenal sebagai wilayah yang selalu dirundung konflik, baik itu konflik antar agama, geografis, dan etnis.

Semua ini membuat dinamika politik di kawasan Timur Tengah memiliki corak ragam yang unik dibandingkan dengan kawasan-kawasan lainnya di belahan dunia ini. Di antara ciri khas politik di

kawasan tersebut adalah adanya sejumlah suku yang memerankan adegan politik yang memiliki episode-episode menarik dari tiap babakannya. Salah satu dari suku-suku tersebut adalah Suku Kurdi. Suku Kurdi sempat mengecap masa keemasan dalam sejarah mereka. Mereka memiliki seorang tokoh pejuang dan pemimpin yang luar biasa seperti Shalahuddin al-Ayyubi, ada juga seorang ilmuwan dan pahlawan semisal Ibnu Taimiyah yang buku-bukunya menjadi rujukan para penuntut ilmu agama hingga hari ini.

Suku Kurdi termasuk suku minoritas yang mendiami beberapa negara di Timur Tengah, seperti Irak, Iran, Turki, dan sebagian wilayah Suriah. Keberadaan suku Kurdi ini menjadi bagian dari

konflik etnis di Timur Tengah yang tergolong berlangsung cukup lama. Suku Kurdi selalu menjadi korban dari rezim penguasa di negara-negara yang mereka diami. Irak, misalnya, pada masa kekuasaan Saddam Hussein, yang melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata kimia terhadap penduduk suku Kurdi pasca Perang Teluk (Sihbudi, 1991: 135). Di Turki, banyak orang Kurdi yang dibantai dan dideportasi oleh rezim Ankara karena pemberontakan yang mereka lakukan pada tahun 1925, 1930, dan 1937 (Sihbudi, 1991: 137). Pada tahun 1988, Iran juga berhasil merebut wilayah Kurdistan Selatan (Sihbudi, 1991: 139).

Fakta sejarah ini membuat suku Kurdi merupakan sebuah potret yang mirip dengan etnis Yahudi yang mengalami diaspora (penyebaran) dari tanah airnya. Dalam batas tertentu, etnis Kurdi dipahami oleh banyak negara sebagai etnis yang senantiasa menimbulkan masalah. Upaya pengintegrasian terhadap etnis ini di berbagai negara Timur Tengah senantiasa gagal meskipun dengan penggunaan instrumen militer. Hal ini lebih disebabkan oleh keinginan etnis Kurdi untuk melakukan separatisme lalu menghimpun dalam sebuah negara baru Kurdi Merdeka (Surwandono, 2009: 173-174).

Pertanyaan yang muncul dari eksistensi suku Kurdi ini adalah mengapa ia selalu dilihat sebagai etnis yang selalu menimbulkan masalah? Mengapa ia melakukan gerakan-gerakan politik untuk membuat negara Kurdi yang merdeka? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang coba penulis jawab dalam tulisan ini.

PEMBAHASAN

LATAR BELAKANG SEJARAH

Suku Kurdi merupakan nama kesatuan etnik. Meskipun berada di wilayah Timur Tengah, suku itu tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab dengan bahasa yang berbeda pula dari bahasa Arab, yaitu bahasa Kurdi. Orang-orang Kurdi adalah suatu kelompok etnis Indo-Eropa (*European tribes*) yang mayoritas menganut agama Islam Sunni dan tinggal di wilayah yang disebut Kurdistan ("tanah orang-orang Kurdi"). Wilayah Kurdistan terdapat di beberapa

negara, seperti Turki bagian tenggara, Iran Utara, Irak Utara, Suriah Utara, dan juga terdapat di Soviet Selatan (wilayah yang secara geografis tidak termasuk Timur Tengah). Komunitas Kurdi juga dapat ditemukan di Lebanon, Armenia, Azerbaijan (Kalbajar dan Lachin, sebelah barat Nagorno Karabakh) dan, pada beberapa dasawarsa terakhir, beberapa negara-negara Eropa serta Amerika Serikat. Secara etnis, kaum ini memiliki hubungan dengan suku bangsa Iran. Mereka menggunakan bahasa Kurdi, suatu bahasa Indo-Eropa dari cabang bahasa Iran.

Karakter geografis Kurdistan yang terdiri dari gugusan perbukitan, struktur sosial yang sangat sarat sentimen tribalisme, serta sistem mata pencarian yang mengandalkan pertanian dan menggembala, memang membuat bangsa dan wilayah Kurdistan menjadi semi-eksklusif sepanjang sejarahnya selama sekitar 3.000 tahun. Sepanjang sejarahnya, tidak ada satu bangsa atau kekuatan pun yang mampu menguasai secara penuh bangsa dan wilayah Kurdi, juga sering disebut sebagai Kurdistan. Yunani, Romawi, Persia, dan bahkan Dinasti berbasis Islam selalu gagal menundukkan secara penuh bangsa Kurdi. Pada era modern pun, sistem yang melahirkan negara seperti Turki, Iran, Irak, dan Suriah gagal pula menguasai secara penuh wilayah Kurdi. Namun, secara geopolitik, karakter geografis Kurdi justru membawa petaka karena harus menerima wilayah itu terbagi di antara lima negara pasca Perang Dunia I.

Berdasarkan catatan sejarah, nenek moyang suku Kurdi memasuki wilayah yang mereka tempati sekarang sekitar 3.000 tahun lalu, tapi cara hidup suku tersebut, sebagai petani dan penggembala, masih tradisional. Sementara banyak ilmuwan berpendapat bahwa suku Kurdi berasal dari suku bangsa Medes yang masuk ke Parsi (Iran) dari kawasan Asia Tengah. Mereka menguasai daerah Pegunungan Parsi dan dari tahun 614 sampai 550 SM. Empat belas Abad kemudian mereka memeluk agama Islam, setelah kedatangan pasukan Arab Islam dari daratan ke daerah Pegunungan Parsi.

Orang-orang Turki sebagai suatu kelompok, memainkan peranan penting dalam sejarah Asia Barat

sampai tahun 1258, saat Kekhalifahan Arab di Baghdad ditaklukkan oleh pasukan Mongol. Salahuddin al-Ayyubi (Saladin) adalah salah satu pemimpin Kurdi yang sangat terkenal dalam dunia Islam. Tokoh yang lahir pada 1137 di Tikrit (Kurdistan Irak) ini, sangat terkenal karena keberhasilannya mengusir Tentara Salib dari Jerusalem pada 1187 (*Sihbudi, 1991: 136*) dalam Perang Salib fase kedua (*Hitti, 2008: 824-825*).

NASIONALISME KURDI, KONFLIK, DAN HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA ARAB

Mayoritas dari suku Kurdi terdapat di negara-negara Timur Tengah, terutama di Iran, Irak, dan Turki, namun suku ini tidak termasuk dalam jajaran etnik Arab dengan bahasa yang berbeda pula dari bahasa Arab, yaitu bahasa Kurdi. Perbedaan keturunan antara suku Arab dan Kurdi inilah di negara-negara yang mereka diami yang seringkali menjadi pangkal meletusnya kerusuhan. Sehingga tidak heran kalau etnis ini selalu dipahami oleh banyak negara sebagai etnis yang senantiasa menimbulkan masalah.

Meskipun tidak termasuk dalam etnik Arab, akan tetapi suku Kurdi ini memainkan peran penting dalam sejarah perpolitikan di Timur Tengah. Perjalanan sejarah politik yang cukup tua, bangsa Kurdi termasuk bangsa yang kurang beruntung. Bahkan, Kurdi disebut sebagai bangsa tragis akibat karakter geografis, sentimen tribalisme, tirani, dan kolonialisme. Tragedi bangsa Kurdi itu pun kemudian dikenal dengan nama "problem Timur". Ironisnya, problem Kurdi sering kali dilupakan, diabaikan. Tidak ada pembelaan terhadap bangsa Kurdi, bahkan dijadikan komoditas politik kekuatan regional maupun internasional untuk tujuan politik tertentu. Suku Kurdi juga menempati kasta kelas bawah dalam heterogenitas masyarakat Arab, hak-hak mereka sering kali dikebiri, melayangnya nyawa mereka seakan disyukuri dan lain sebagainya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwasanya permusuhan-permusuhan yang dilontarkan oleh Arab disambut dengan perlawanan juga oleh Kurdi. Salah satu bentuk perlawanan mereka adalah dengan cara gerakan nasionalisme Kurdi.

Orang-orang Kurdi sendiri baru memperjuangkan nasib suku bangsa mereka pada Abad XIX. Tepatnya pada 1880, ketika pecah pemberontakan yang dipimpin oleh tokoh Kurdi, Syaikh Ubaidullah, di Propinsi Hakari yang berada di bawah kekuasaan Dinasti Utsmaniah (*Ottoman Empire*) Turki. Pada tahun 1897, orang-orang Kurdi menerbitkan sebuah surat kabar yang diberi nama *Kurdistan* untuk yang pertama kalinya. Surat kabar ini mempunyai tujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang budaya dan perjuangan bangsa Kurdi (*Sihbudi, 1991: 136*).

Cita-cita dan perjuangan bangsa Kurdi adalah untuk mendapatkan tanah air mereka sejak awal Abad XIX. Perjanjian Sevres 1920 (Sevres adalah sebuah kota di Prancis) yang memberikan jaminan berdirinya sebuah negara Kurdistan Merdeka dalam kenyataannya tidak pernah terealisasikan. Orang-orang Kurdi mempunyai sebuah cita-cita untuk mendirikan wilayah Kurdistan yang otonom, tempat mereka dapat mengatur diri mereka sendiri serta mempertahankan identitas dan sistem sosial budaya mereka. Fakta bahwa wilayah Kurdistan berada di beberapa negara, menjadi kendala utama bagi terwujudnya sebuah negara Kurdistan Merdeka. Sementara wilayah Kurdistan sudah terintegrasi ke dalam negara-negara Turki, Iran, Irak (juga Soviet dan Suriah) sejak negara-negara tersebut berdiri (*Sihbudi, 1991: 138*). Inilah yang menjadi sumber utama dari konflik yang dikarenakan oleh kehadiran Suku Kurdi di negara-negara seperti Irak, Iran, dan Turki. Maka, setiap aktivitas dari suku Kurdi untuk memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Jalan menuju kemerdekaan bagi Kurdistan seakan menunggu kehancuran tiga negara yang menguasainya.

GERAKAN DAN PERJUANGAN POLITIK KURDI

Dari penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa suku Kurdi tersebar di tiga negara utama, yaitu Irak, Iran, dan Turki. Oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan perjuangan politik suku Kurdi di tiga negara tersebut.

IRAK

Data pada bulan Juli 2006 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Irak ialah 26.783.383. Antara 75 hingga 80 persen penduduk Irak adalah bangsa Arab; kelompok etnis utama lainnya adalah Kurdi (15-20%), Asiria, Turkmen Irak dll (5%), yang kebanyakan tinggal di utara dan timur laut negeri. Kelompok lainnya adalah orang Persia dan Armenia (kemungkinan keturunan budaya Mesopotamia kuno). Sekitar 25.000-60.000 orang Arab Masih tinggal di selatan Irak. Wilayah yang didiami oleh suku Kurdi di utara ini dikenal sebagai wilayah yang subur dan kaya minyak.

Perbedaan keturunan antara suku Arab, yang mayoritas, dan Kurdi di Irak seringkali menjadi pangkal meletusnya kerusuhan. Orang Arab telah memerintah Irak sejak 1958, ketika pecah revolusi yang mengakhiri kekuasaan Inggris, yang bersekutu dengan suku Kurdi dalam upaya mempertahankan kekuasaan di negara Abu Nuwas tersebut. Setelah revolusi, pemerintah Irak berusaha menyatukan suku Kurdi ke dalam pemerintahan, tapi kelompok ekstrem suku itu menolak bergabung sehingga meletuslah perang sejak saat itu.

Pada saat referendum diadakan, sebagian besar dari suku Kurdi tidak memberikan suara. Ini menjadi pertanda bahwa suku Kurdi di Irak ini tidak bersedia dipimpin oleh bangsa Arab yang mayoritas. Pada masa antarperang mereka tetap bergolak, dan pecah menjadi pemberontakan ketika kesabaran mereka habis melihat kesewenang-wenangan pemerintah dan juga praktek korupsi oleh para elite. Pemberontakan besar pecah pada tahun 1922-1924, 1930-1931, dan 1932 di bawah pimpinan Shaikh Mahmud dari Sulaimaniyah. Pemberontakan itu, selain menjadi masalah dalam negeri Irak, juga menjadi bagian dari masalah internasional. Hal ini disebabkan oleh tinggalnya suku Kurdi di lima wilayah negara lain. Mereka sangat kompak, dan sering terjadi bahwa mereka yang terdesak menyeberangi wilayah Irak untuk kemudian tinggal dan mendapatkan perlindungan di daerah suku Kurdi yang ada di negara lain (Lenczowski, 1993: 172).

Perjuangan suku Kurdi memang dimulai sejak

tahun 1923, yang dipimpin oleh Ahmad Barzani dan Adiknya, Mulla Mustafa Barzani, yang melancarkan kampanye panjang yang bertujuan mendapatkan otonomi bagi wilayah Kurdistan Irak. Perjuangan ini terorganisir di bawah payung partai politik yang bernama Partai Demokratik Kurdi (*Kurdish Democratic Party*). Selain KDP, orang Kurdi juga punya partai lain bentukan Jalal Talabani, yaitu Uni Patriotik Kurdistan (*Patriotic Union of Kurdistan*) (Sihbudi, 1991: 137).

Suku Kurdi sebagai masalah yang tidak terselesaikan dalam politik Irak juga sering melibatkan atau berkaitan dengan pihak asing, terutama Inggris dan Uni Soviet (Rusia saat ini), untuk memperkeruh suasana. Setelah Perang Dunia I, Inggris bercita-cita membuat negara Kurdi yang berada di bawah perlindungan Inggris untuk meluaskan pengaruhnya ke utara yang berbatasan dengan Kaukasus, juga untuk menekan Kemal Turki, Iran, dan terutama Irak. Walaupun pada akhirnya niat ini ditinggalkan karena akan berbahaya bagi kepentingan Inggris di Timur Tengah, termasuk Irak. Tapi bukan berarti Inggris membuang sama sekali persahabatannya dengan suku Kurdi, terutama di tingkat lokal. Hal ini dilakukan dengan dua alasan: *pertama*, sebagai taktik bila suatu waktu menghadapi kesulitan dengan Baghdad dan Teheran (Iran); dan *kedua*, untuk mencegah penetrasi asing, baik Soviet maupun Jerman. Tetapi Inggris membantu Irak memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi pada tahun 1932 karena kebijakannya yang pro-Arab (Lenczowski, 1993:172-173). Di Iran, organisasi politik kurdi, *Komala*, juga menyebarkan kegiatannya ke pusat-pusat Kurdi di Irak (1943). Dengan dukungan Soviet terhadap kemerdekaan Kurdi-Iran, suku Barzani di Irak melakukan pemberontakan pada tahun 1943 yang dipimpin oleh Mulla Mustafa. Walaupun pada akhirnya dipaksa melarikan diri ke Iran untuk bergabung dengan suku Kurdi di sana (Lenczowski, 1993: 181).

Pada masa kekuasaan Saddam Husain, suku Kurdi berkali-kali berhadapan dengan pembantain oleh rezim Saddam. Keberadaan suku Kurdi yang non-Arab itu ternyata menjadi hambatan tersendiri bagi Saddam

Husein dalam menjalankan obsesinya menggelorakan semangat nasionalisme Arab. Bahkan pada tahun 1988, tercatat bahwa dua kali Saddam melakukan pembantaian dengan menggunakan senjata kimia terhadap suku Kurdi ini. Hal itu dilakukan oleh Saddam karena selama perang Iran-Irak, warga Kurdi Irak justru berpihak kepada pasukan Ayatullah Khomeini dan memerangi pasukan Saddam Hussein (*Sihbudi, 1991: 135*).

Di Irak, sampai sekarang suku Kurdi dianggap sebagai gerakan separatis yang merongrong kedaulatan Irak. Mereka ditengarai akan memisahkan diri dari kedaulatan Irak atau bahkan merebut kekuasaan di Irak dengan melakukan pemberontakan. Kekhawatiran ini sempat dilontarkan oleh Presiden Irak Jalaluddin Thalibani dengan kalimatnya, "Terus terang saya sampaikan, jika pasukan AS meninggalkan Irak sekarang, akan terjadi tindakan militer semena-mena dari kekuatan pasukan Kurdi dan Syiah. Mereka kini dalam kondisi siap. Mereka memiliki ratusan ribu pasukan bersenjata. Mereka mampu menguasai Irak dengan cepat, dan melebar ke seluruh Irak" (<http://eramuslim.com>). Dalam kongres KDP di Irbil Desember 2010, ketua KDP, Masoud Barzani, meminta hak Kurdi untuk bisa menentukan nasib sendiri. Pernyataan Barzani ini menunjukkan bahwa impian rakyat Kurdi memiliki negara sendiri tidak pernah pupus sejak zaman kuno hingga sekarang (*Kompas, 13/12/2010*).

Sejak ambruknya Dinasti Media (653-625 SM) yang berkuasa di wilayah Mesopotamia utara dan Anatolia Timur (wilayah Kurdistan sekarang), rakyat Kurdi tidak pernah lagi berada di bawah satu kekuasaan regional. Rakyat Kurdi setelah itu berada di bawah kekuasaan berbagai imperium, mulai dari Romawi, Persia, Umayyah (era Islam), Abbasia (era Islam), Ottoman (era Islam), kemudian di bawah otoritas empat negara, yaitu Turki, Irak, Iran, dan Suriah (era negara bangsa sejak abad ke-20) (*Kompas, 13/12/2010*).

Dampak dari keresahan pemerintah Irak terhadap ancaman Kurdi ini adalah pembekuan akses-akses Kurdi yang diyakini berpotensi untuk merebut

kekuasaan. Partai buruh kurdi yaitu PKK dibekukan oleh Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki ia mengatakan, "PKK adalah organisasi teroris dan kami sudah mengambil keputusan untuk menutup kantor-kantor perwakilan mereka dan tidak mengizinkan mereka beroperasi lagi di wilayah Irak" (<http://eramuslim.com>).

IRAN

Iran dikenal sebagai negara para Mullah dan termasuk salah satu negara utama yang didiami oleh kelompok suku Kurdi. Iran berbatasan dengan Azerbaijan (500 km) dan Armenia (35 km) di barat laut dan Laut Kaspia di utara, Turkmenistan (1000 km) di timur laut, Pakistan (909 km) dan Afganistan (936 km) di timur, Turki (500 km) dan Irak (1.458 km) di barat, dan perairan Teluk Persia dan Teluk Oman di selatan.

Iran juga termasuk negara yang terdiri dari banyak suku dan agama. Etnik mayoritas ialah etnik Persia (51% dari rakyatnya,) dan 70% rakyatnya adalah bangsa Iran, keturunan orang Arya. Kebanyakan penduduk Iran berkomunikasi dalam bahasa yang tergolong dalam keluarga Bahasa Iran, termasuk bahasa Persia. Kumpulan minoritas Iran ialah Azeri (24%), Gilaki dan Mazandarani (8%), Kurdi (7%), Arab (3%), Baluchi (2%) Lur (2%) Turkmen (2%), dan juga suku-suku lain (1%).

Data ini menunjukkan bahwa persentase warga Kurdi di negara Mullah tersebut, yang kurang lebih 90 persen penganut Syi'ah, tergolong lebih sedikit dari pada persentase warga Kurdi yang ada di Irak. Di Iran, suku Kurdi mendiami Provinsi Kurdistan (Khuzastan) yang kaya akan minyak. Dalam perjuangannya, orang-orang Kurdi di Iran juga membentuk Partai Politik. Tahun 1942, di Mahabad berdiri Partai Komunis Kurdi Iran (Komola), yang merupakan partai politik pertama yang dibentuk oleh orang-orang Kurdi Iran. Kemudian pada 2945, berdiri Partai Demokratik Kurdi Iran (KDPI) yang menggabungkan semua gerakan suku Kurdi, termasuk Komola pada tahun yang sama, mereka memproklamasikan berdirinya apa yang disebut sebagai "Republik Mahabad" dengan

“presiden”-nya Qazi Mohammad.

Inilah “negara Kurdi merdeka” pertama dan satu-satunya dalam sejarah, meskipun hanya berumur satu tahun, karena pada 1946 pasukan Kerajaan Iran menyerbu Mahabad dan membubarkan “republik” tersebut. sejumlah pimpinan Kurdi, termasuk “presiden” Qazi Mohammad, ditangkap dan dieksekusi (Sihbudi, 2009: 137).

Ketika konstalasi politik Iran mengalami perubahan, ketika gelombang anti-Syah, 1978-1979, menyebar luas di bawah pimpinan Ayatullah Khomeini, para *peshmarga* (pejuang) mengambil sikap politik untuk bergabung dengan kaum pendukung Khomeini. Setelah Shah jatuh, suku Kurdi mengajukan tiga tuntutan kepada rezim kaum Mullah, yaitu otonomi provinsi Kurdistan, penghapusan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan, dan pembagian yang adil dari hasil tambang minyak.

Teheran tidak bersedia memenuhi tuntutan tersebut, akibatnya para *peshmarga* kembali mengangkat senjata dan melawan pemerintah pusat. Awal Juni 1979, untuk pertama kalinya para *peshmarga* terlibat dalam bentrokan dengan *pasdaran* (pasukan pengawal revolusi Iran) yang menelan korban sekitar 100 jiwa. Konflik antara *peshmarga* dan *pasdaran* terus berlanjut sampai 1984, terutama setelah KDP (Iran) yang dipimpin Abdulrahman Ghassemlou. Namun pada 1985, pemimpin KDP tersebut memilih untuk kembali ke meja perundingan dengan penguasa Teheran. Walaupun pada akhirnya tidak ada hasil yang dicapai oleh KDP. Pemerintah Khomeini menolak untuk memberikan otonomi bagi Provinsi Kurdistan karena wilayah tersebut kaya dengan minyak, yang banyak memberikan andil terhadap pendapatan negara (Sihbudi, 2009: 139).

TURKI

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak saat itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat

sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Dibandingkan dengan Irak dan Iran, populasi suku Kurdi di Turki adalah yang terbesar, jumlahnya mencapai 30 juta jiwa (Internationale, 1/3, 2008).

Di Turki, orang-orang Kurdi tiga kali melancarkan pemberontakan secara besar-besaran, yaitu pada 1925, 1930, dan 1937. Semua pemberontakan ini berakhir dengan kegagalan total, sehingga banyak orang Kurdi yang dibantai maupun yang dideportasi oleh rezim Ankara. Pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi sebagai bentuk penentangannya yang paling keras terhadap sekularisasi yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Attaturk. Oleh karena itu, mereka menuntut pengembalian Islam kepada statusnya yang lama. Permintaan lainnya adalah otonomi lokal (Lenczowski, 1993: 84). Pemerintahan sekuler, akhirnya, di bawah Mustafa Kemal Attaturk, yang menggantikan Dinasti Usmaniah, berhasil menyatukan orang-orang Turki dan Kurdi. Rezim Ankara mengkombinasikan kebijakan represif dan integrasi terhadap suku Kurdi. Sehingga, secara resmi tidak orang-orang Kurdi di Turki (Sihbudi, 1991: 137-138).

Pascakemerdekaan Irak tahun 1932, bangsa Kurdi semakin terisolasi dan terpecah-pecah. Mereka yang mendiami daerah-daerah perbatasan ini selalu menjadi korban pertikaian antara Irak, Iran, dan Turki. Karena frustrasi atas semakin tertutupnya peluang menuju kemerdekaan, muncullah kelompok-kelompok militan Kurdi yang kerap melancarkan aksiaksi terorisme (Internationale, 1/3, 2008).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwasanya permusuhan yang dilontarkan oleh Arab disambut dengan perlawanan juga oleh Kurdi. Salah satu bentuk perlawanan mereka adalah dengan cara gerakan nasionalisme Kurdi. Berbeda dengan di Irak, di Turki nasionalisme Kurdi menginginkan otonomi, bukan pemisahan, karena kebanyakan suku Kurdi di sana memiliki saham dalam sistem ekonomi dan politik dan menginginkan peningkatan dalam hak-hak kewarganegaraan dan politik mereka ketimbang perpisahan. Meski demikian, mereka masih

mengagumi prestasi simbolis suku Kurdi Irak: Bendera tiga warna Kurdi dengan matahari keemasan di tengahnya, ritual masyarakat umum untuk menghormati para pahlawan Kurdi, dan pengadopsian bahasa Kurdi sebagai bahasa resmi. Ungkapan-ungkapan identitas budaya dan politik semacam itu menghadapi hambatan hukum dan rintangan administrasi di Turki, meskipun sudah ada reformasi undang-undang dan hukum sejak akhir 1990an.

Serangan terhadap suku Kurdi yang terakhir kalinya adalah Serangan besar-besaran militer Turki pada bulan Februari 2008 ke basis milisi Kurdi di Pegunungan Qandil yang menewaskan ratusan jiwa dari kelompok Kurdi (*Internationale*, 1/3, 2008). Dikabarkan Amerika Serikat (AS) sendiri ikut terlibat dalam operasi yang digelar hingga wilayah Irak Utara. Serangan militer yang dibungkus dengan slogan memerangi terorisme memang didukung oleh AS dan Uni Eropa. Mengingat salah satu faksi Kurdi yang ada di Turki bagian tenggara yaitu *Partiye Karkaren Kurdistan* (Partai Pekerja Kurdistan, PKK) telah dimasukkan dalam daftar kelompok teroris internasional. Kelompok Kurdi pro AS di Irak Utara juga membiarkan serangan ke wilayahnya karena adanya konflik yang terjadi di antara mereka. Bangsa Kurdi yang mendambakan kemerdekaan sejak hampir seabad lamanya, kini nasibnya semakin tidak menentu. Hidup berserak sebagai minoritas di antara wilayah Turki, Iran, Irak dan sebagian kecil di Siria. Nampaknya, operasi militer Turki ke wilayah Kurdi pada tahun 2008 tersebut diyakini akan semakin menciptakan eskalasi kekerasan di kawasan Timur Tengah.

KESIMPULAN

Kebangkitan nasionalisme bangsa Kurdi, yang dimulai sejak Abad XIX tersebut serta kemerdekaan yang dijanjikan oleh Presiden AS Woodrow Wilson (1856–1924) melalui Perjanjian Sevres (*The Treaty of Sevres*) tahun 1920, memang menghadirkan tantangan unik pada orde politik yang kuat di wilayah Timur Tengah. Namun sepertinya cita-cita kemerdekaan tersebut semakin sulit terealisasi karena lokasinya yang strategis secara geopolitik dan tersedianya minyak

dalam jumlah besar lengkap dengan jalur-jalur pipanya menuju Eropa dan Israel di daerah-daerah yang didiami oleh suku Kurdi. Setiap aktivitas untuk memerdekakan diri selalu berakhir dengan penumpasan dan penindasan. Jalan menuju kemerdekaan bagi Kurdistan seakan menunggu kehancuran tiga negara yang menguasainya (*Internationale*, 1/3, 2008). Apalagi ketiga negara tersebut, Irak, Iran, dan Turki, seringkali membangun kerja sama untuk memadamkan gejolak pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi. Selain dari itu, kehadiran pihak asing juga seringkali menjadikan suku Kurdi sebagai tumbal politik.

REFERENSI

- Hitti, Philip K. 2006. *History of The Arabs*. Jakarta: Serambi.
<http://eramuslim.com/berita/dunia/irak-galang-kekuatan-dengan-turki-berangus-kelompok-bersenjata-kurdi.htm>. Diakses 17 Mei 2010.
<http://eramuslim.com/berita/dunia/presiden-irak-resah-ancaman-milisi-syah-dan-kurdi.htm>. Diakses 17 Mei 2010.
- Kompas, 13 Desember, 2010. Barzani: Kurdi Ingin Tentukan Nasib Sendiri, hlm. 9.
- Lenczowski, George. 1993. *Timur Tengah Di Tengah Kancah Dunia*. Terj. Asgar Bixby. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sihbudi, Riza, M., dkk (ed). 1995. *Profil Negara-Negara Timur Tengah*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Sihbudi, Riza, M.. 1991. *Bara Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Surwandono. 2009. *Resolusi Konflik Di Dunia Islam*. Yogyakarta: UMY.